

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam bentuk Otonomi Daerah. Dengan asas desentralisasinya, otonomi daerah memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Yakobus, 2008). Kewenangan tersebut membutuhkan adanya pengawasan yang optimal, karena pengawasan bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang, menekan terjadinya kerugian negara dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan internal pemerintah daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Peran dan fungsi inspektorat kabupaten secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat kabupaten mempunyai fungsi perencanaan program

pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Fakta yang banyak terjadi pada saat ini, khususnya pada pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah belum siap dan terkesan kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus korupsi dan penyuapan yang melibatkan aparatur pemerintah daerah yang ada di inspektorat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat mengindikasikan adanya penyuapan terhadap oknum pejabat Pemerintah Kota Bekasi, salah satunya adalah kepala inspektorat Pemkot Bekasi (<http://infokorupsi.com>).

Kasus berikutnya yang terjadi adalah kualitas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas Inspektorat Kota Gorontalo yang banyak mendapat sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat selaku auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2006, terdapat delapan temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat kabupaten Gorontalo masih relatif rendah (Efendy, 2010).

Kondisi yang sama juga terjadi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dalam melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah Provinsi Sumbar dinilai tidak optimal karena banyaknya temuan BPK yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat. BPK Perwakilan Sumbar menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sumbar tahun anggaran

2011 terdapat beberapa temuan (Ayura, 2013) seperti; 1) belanja bantuan sosial Rp.21 milyar yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai resiko sosial; 2) investasi aset tanah yang tidak disesuaikan dengan harga wajar pada saat perolehan tanah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; 3) tidak disajikannya aset tidak berwujud dalam neraca per 31 Desember 2011.

Kasus lain yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten Sanggau (Yakobus, 2008), dimana sebanyak dua belas pengaduan masyarakat terhadap terjadinya penyelewengan atau kegiatan korupsi sudah ditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh aparat pengawas inspektorat kabupaten Sanggau. Terbukti dengan adanya dua belas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus dengan kategori penyelesaian semua (100%). Namun, yang terjadi adalah tidak adanya pelimpahan LHP khusus tersebut oleh inspektorat kabupaten Sanggau kepada aparat penegak hukum untuk meneruskan pengaduan masyarakat tersebut.

Serupa dengan inspektorat kabupaten Padang Pariaman yang mendapat sorotan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) karena kerap tidak disiplin dalam melakukan pemeriksaan (Amril, 2013). Hal tersebut diperlihatkan dengan tidak adanya ekspos/pemaparan temuan tim pemeriksa terhadap SKPD yang diperiksa, sehingga SKPD kesulitan dalam menindaklanjuti temuan audit. Inspektorat juga dinilai tidak konsisten dalam mengangkat sebuah temuan dikarenakan data audit yang diperoleh kurang akurat, hal ini menyebabkan beban permasalahan baru bagi SKPD yang diperiksa.

Berbagai kasus di atas memerlukan penanganan yang serius utamanya pada peningkatan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya roda pemerintahan daerah yang akuntabel. Permasalahan yang dihadapi oleh APIP yang berada pada inspektorat adalah masalah peningkatan kapabilitas. Dimana kondisi yang terjadi terdapat 94,12% APIP di

Indonesia masih berada pada Level 1 (*initial*). Menurut data Pemetaan Kapabilitas APIP tahun 2010 sampai 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat kabupaten Bangkalan berada pada level 1, sedangkan inspektorat kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep belum melakukan penilaian peningkatan kapabilitas APIP. Penyebab APIP berada pada level 1 menurut BPKP adalah berupa:

- a. Komitmen pimpinan inspektorat yang masih kurang
- b. Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai
- c. Anggaran belum memadai
- d. Ruang lingkup kegiatan pengawasan terbatas
- e. Perencanaan belum berdasarkan prioritas/risiko
- f. Standar audit dan kendali mutu belum diterapkan

Dengan hasil pemetaan di atas, khususnya pada inspektorat kabupaten/kota, seluruh staf maupun auditor yang ada pada badan tersebut memerlukan dan wajib mempertahankan serta mengidentifikasi tingkat kompetensi atau keahlian yang memadai guna menyelesaikan tugas yang diberikan. Pimpinan yang ada pada inspektorat kabupaten/kota perlu memperhatikan tekanan ketaatan yang dihadapi oleh auditor dalam suatu penugasan audit, sehingga tidak mengganggu independensinya serta ruang lingkup kegiatan pengawasannya menjadi luas. Pengalaman auditor juga mempengaruhi keberhasilan suatu audit di lapangan serta dapat meningkatkan kualitas SDM. Perencanaan audit harus berdasarkan prioritas/risiko untuk memudahkan pendeteksian temuan berindikasi *fraud* yang dilakukan oleh SKPD yang diperiksa. Penerapan standar audit dan kendali mutu dapat membantu auditor internal mengungkap kecurangan.

Penelitian tentang pendeteksian kecurangan telah dilakukan oleh Aulia (2013) yang menggunakan sampel auditor pada Kantor Akuntan Publik Wilayah

Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel skeptisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) bertujuan menganalisis pengaruh profesionalisme, keahlian, pengetahuan mendeteksi kecurangan dan adaptasi *Sarbanes Oxley Act 202 section 404* terhadap pengungkapan kecurangan. Metode statistik yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian adalah variabel profesionalisme, keahlian, pengetahuan mendeteksi kecurangan dan adaptasi *Sarbanes Oxley Act 202 section 404* secara signifikan dan simultan berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2010), penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengalaman audit, independensi, keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengalaman audit, independensi, keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan.

Penelitian terhadap aparat inspektorat dilakukan oleh Efendy (2010), yang meneliti aparat inspektorat kota Gorontalo. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas kompetensi, independensi dan motivasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu seperti; Aulia (2013), Siregar (2011), Matondang (2010), Efendy (2010), Pertiwi (2010) dan Sukriah *dkk.* (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penambahan satu variabel independen yaitu tekanan ketaatan, variabel tekanan ketaatan diperoleh dari penelitian Indira dan Anugerah (2011). Pemilihan variabel tersebut dikarenakan APIP inspektorat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam pekerjaannya harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku, taat pada atasan dan pimpinan tertinggi di pemerintahan. Segala macam tekanan berupa ketaatan yang dihadapi oleh APIP dalam melakukan tugas pengawasan atau audit, menjadi bahan yang menarik untuk diteliti lebih jauh pada penelitian ini.
2. Untuk variabel dependen yaitu pendeteksian temuan berindikasi *fraud* dilakukan pada auditor inspektorat kabupaten se wilayah Madura, berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) dan Sukriah *dkk.* (2009) yang menggunakan variabel dependen kualitas hasil pemeriksaan. Pendeteksian temuan kecurangan merupakan hal yang penting bagi tercapainya kualitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap independensi?
2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap independensi?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap independensi?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*?

5. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*?
6. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*?
7. Apakah independensi berpengaruh terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*?
8. Apakah kompetensi, tekanan ketaatan dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud* melalui independensi sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi terhadap independensi
2. Pengaruh tekanan ketaatan terhadap independensi
3. Pengaruh pengalaman auditor terhadap independensi
4. Pengaruh kompetensi terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*
5. Pengaruh tekanan ketaatan terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*
6. Pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*
7. Pengaruh independensi terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*
8. Pengaruh kompetensi, tekanan ketaatan dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud* melalui independensi sebagai variabel *intervening*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dalam bidang-bidang tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah APIP agar dalam melaksanakan tugas audit dapat meningkatkan kompetensinya, menghadapi tekanan ketaatan dengan baik, memperkaya pengalaman dan tetap menjaga independensinya agar dapat mendeteksi adanya sebuah kecurangan yang terjadi.
2. Hasil studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya di bidang auditing, sekaligus memberikan bukti empiris tentang peranan variabel kompetensi, tekanan ketaatan dan pengalaman auditor serta independensi terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*
3. Mendorong para peneliti-peneliti baru yang mungkin ingin mengembangkan lebih jauh topik penelitian di atas agar lebih memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimanakah kinerja auditor yang mampu mendeteksi temuan berindikasi *fraud* dengan harapan masyarakat dapat juga memberikan pengawasan terhadap kinerja APIP.

